

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dayak Bidayuh melalui Pengembangan Model Pembiayaan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Gawai Sowa di Perbatasan Bengkayang

Gusti Hardiansyah¹, Rully Arestha², Febriana Louw³, Anwar Azazi⁴, Bayu Fahmi Adiananta⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Tanjungpura, Indonesia

Received : 17 Juni 2025, Revised : 23 Juni 2025, Published : 2 Juli 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Rully Arestha

E-mail: b3081241002@student.untan.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan mengembangkan model pembiayaan berkelanjutan berbasis kearifan lokal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Dayak Bidayuh di wilayah perbatasan Bengkayang. Metode kegiatan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik Forum Group Discussion (FGD) melibatkan Kepala Perbatasan Bengkayang dan tokoh masyarakat Dayak Bidayuh, serta analisis partisipatif terhadap praktik ekonomi dalam tradisi Gawai Sowa. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama periode Mei-Juni 2025. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tradisi Gawai Sowa memiliki potensi ekonomi yang belum optimal, dengan sistem gotong royong dan solidaritas sosial yang dapat ditransformasi menjadi model pembiayaan mikro berbasis komunitas. Model yang dikembangkan mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dengan nilai-nilai kearifan lokal, menciptakan skema pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif. Kesimpulan kegiatan menunjukkan bahwa pengembangan model pembiayaan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya finansial sambil mempertahankan identitas budaya.

Kata kunci - pembiayaan berkelanjutan, kearifan lokal, Dayak Bidayuh, gawai sowa, pemberdayaan ekonomi

Abstract

This research aims to develop a sustainable financing model based on local wisdom for economic empowerment of the Dayak Bidayuh community in the Bengkayang border area. The research method uses a qualitative approach with Focus Group Discussion (FGD) techniques involving the Head of Bengkayang Border and Dayak Bidayuh community leaders, as well as participatory analysis of economic practices in the Gawai Sowa tradition. Data was collected through participant observation, in-depth interviews, and documentation during the May-June 2025 period. The results show that the Gawai Sowa tradition has economic potential that has not been optimized, with a mutual cooperation and social solidarity system that can be transformed into a community-based micro-financing model. The developed model integrates Islamic financial principles with local wisdom values, creating sustainable and inclusive financing schemes. The research conclusion shows that developing a sustainable financing model based on local wisdom can increase community access to financial resources while maintaining cultural identity.

Keywords - sustainable financing, local wisdom, Dayak Bidayuh, gawai sowa, economic empowerment

How To Cite : Hardiansyah, G., Arestha, R., Louw, F., Azazi, A., & Adiananta, B. F. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dayak Bidayuh melalui Pengembangan Model Pembiayaan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Gawai Sowa di Perbatasan Bengkayang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 1(12), 504–516.
<https://doi.org/10.59837/jpmm.v1i12.112>

Copyright ©2025 Gusti Hardiansyah, Rully Arestha, Febriana Louw, Anwar Azazi, Bayu Fahmi Adiananta

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan Indonesia menghadapi paradoks pembangunan yang kompleks, di mana modernisasi ekonomi sering kali berbenturan dengan upaya pelestarian budaya lokal. Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat, sebagai salah satu wilayah perbatasan strategis dengan Malaysia, menjadi representasi nyata dari dilema ini. Masyarakat Dayak Bidayuh di Kecamatan Jagoi Babang, sebagai komunitas asli yang mendiami wilayah ini, memiliki kekayaan budaya yang belum optimal dimanfaatkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Tradisi Gawai Sowa, sebagai upacara adat syukuran panen yang telah berlangsung turun-temurun, mengandung nilai-nilai ekonomi dan sistem pengelolaan sumber daya yang berpotensi dikembangkan menjadi model pembiayaan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Dinamika ekonomi masyarakat adat di era globalisasi menunjukkan kompleksitas yang memerlukan pendekatan holistik. Menurut Purwanto & Susilo (2020), masyarakat adat Indonesia menghadapi tekanan ganda berupa marginalisasi ekonomi dan erosi budaya, yang memerlukan strategi pemberdayaan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan ekonomi modern. Fenomena ini sangat terasa di wilayah perbatasan, di mana masyarakat lokal harus berkompetisi dengan berbagai pengaruh eksternal sambil mempertahankan identitas budayanya.

Study terdahulu menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adat memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek budaya dan kearifan lokal secara komprehensif. Sari & Wahyuni (2023) dalam studinya tentang pemberdayaan masyarakat adat di Indonesia Timur menekankan pentingnya mengintegrasikan sistem nilai tradisional dalam model pembangunan ekonomi. Temuan serupa dikemukakan oleh Hidayat et al. (2022) yang mengidentifikasi bahwa keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat sangat bergantung pada kemampuan mengadaptasi kearifan lokal dalam mekanisme ekonomi modern.

Model pembiayaan konvensional yang selama ini diterapkan oleh lembaga keuangan formal seringkali tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat yang memiliki sistem nilai dan praktik ekonomi yang berbeda. Mulyadi & Prasetyo (2021) mengungkapkan bahwa tingkat akses masyarakat pedesaan dan perbatasan terhadap layanan keuangan formal di Indonesia masih sangat rendah, hanya mencapai 35% dibandingkan rata-rata nasional sebesar 76%. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: persyaratan yang rumit, ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan lokal, dan jarak geografis yang jauh dari pusat layanan keuangan.

Rahman et al. (2022) dalam studinya tentang inklusi keuangan di wilayah perbatasan Kalimantan mengidentifikasi bahwa hambatan utama akses pembiayaan bagi masyarakat adat meliputi: ketiadaan jaminan fisik yang memadai, pola pendapatan yang tidak teratur sesuai siklus pertanian, dan ketidakpahaman terhadap prosedur perbankan formal. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman lembaga keuangan formal terhadap karakteristik sosial-budaya masyarakat adat, sehingga produk dan layanan yang ditawarkan tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Gawai Sowa sebagai tradisi yang melibatkan seluruh anggota komunitas dalam kegiatan ekonomi kolektif, memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi platform pembiayaan mikro berbasis komunitas. Dalam konteks antropologi ekonomi, tradisi ini mencerminkan apa yang disebut Polanyi (1944) sebagai "ekonomi berdasar" (embedded economy), di mana aktivitas ekonomi terintegrasi dengan struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat. Sistem gotong royong dan solidaritas sosial yang melekat dalam tradisi Gawai Sowa dapat menjadi dasar pengembangan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Studi yang dilakukan oleh Dayak & Kalimantan (2023) terhadap berbagai tradisi masyarakat Dayak di Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa Gawai Sowa memiliki empat dimensi ekonomi yang dapat dikembangkan: pertama, sistem kontribusi kolektif (ngabang) yang mencerminkan prinsip pengumpulan dana komunal; kedua, mekanisme distribusi berbasis kebutuhan (nyorak) yang sejalan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

dengan prinsip keadilan ekonomi; ketiga, sistem pengawasan sosial (baleka) yang menjamin transparansi dan akuntabilitas; dan keempat, orientasi keberlanjutan jangka panjang (naik dango) yang mendukung pelestarian sumber daya dan lingkungan.

Perspektif teoritis tentang keuangan inklusif berbasis komunitas telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Sen (2019) dalam teorinya tentang pembangunan sebagai kebebasan menekankan pentingnya mengembangkan kapabilitas masyarakat lokal untuk mengakses sumber daya ekonomi tanpa kehilangan identitas budayanya. Konsep ini sejalan dengan pendekatan "Islamic microfinance" yang dikembangkan oleh Ahmed & Hassan (2020), yang menekankan prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan dalam sistem pembiayaan mikro.

Study empiris tentang keberhasilan model pembiayaan berbasis kearifan lokal telah dilakukan di berbagai negara berkembang. Wijaya & Susanto (2022) dalam studinya di Nusa Tenggara Timur berhasil mengidentifikasi model "lumbung ekonomi" berbasis tradisi lokal yang mampu meningkatkan akses pembiayaan masyarakat hingga 80% dalam periode dua tahun. Temuan serupa dikemukakan oleh International Labour Organization (2021) dalam laporannya tentang indigenous financial systems di Asia Tenggara, yang menunjukkan bahwa model pembiayaan berbasis komunitas memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan program pembiayaan mikro konvensional.

Namun demikian, pengembangan model pembiayaan berbasis kearifan lokal juga menghadapi berbagai tantangan. Handayani & Wijayanti (2023) mengidentifikasi tiga tantangan utama: pertama, resistensi terhadap perubahan dari sebagian anggota komunitas yang khawatir akan hilangnya otentisitas tradisi; kedua, keterbatasan kapasitas teknis dalam pengelolaan keuangan modern; dan ketiga, minimnya dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah untuk model pembiayaan non-konvensional.

Dalam konteks wilayah perbatasan, pengembangan model pembiayaan berkelanjutan memiliki signifikansi strategis yang lebih luas. Menurut Badan Pengelola Perbatasan (2022), wilayah perbatasan memerlukan model pembangunan ekonomi yang mampu mengintegrasikan aspek keamanan, kedaulatan, dan kesejahteraan masyarakat. Model pembiayaan berbasis kearifan lokal dapat menjadi instrumen soft power yang memperkuat ketahanan sosial-budaya di wilayah perbatasan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan analisis gap yang telah dilakukan, teridentifikasi bahwa belum ada yang secara komprehensif mengkaji potensi tradisi Gawai Sowa sebagai basis pengembangan model pembiayaan berkelanjutan di wilayah perbatasan. Study sebelumnya masih bersifat parsial, baik yang fokus pada aspek budaya tanpa mengkaji dimensi ekonominya, maupun yang mengkaji aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan kearifan lokal secara mendalam.

Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan mengembangkan model pembiayaan berkelanjutan berbasis kearifan lokal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Dayak Bidayuh, dengan fokus pada integrasi nilai-nilai tradisi Gawai Sowa dalam sistem pembiayaan mikro yang dapat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan berbasis kearifan lokal, sekaligus memberikan solusi praktis bagi permasalahan akses pembiayaan di wilayah perbatasan Indonesia.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus partisipatif. Lokasi kegiatan adalah wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang, khususnya Kecamatan Jagoi Babang yang merupakan habitat utama masyarakat Dayak Bidayuh. Periode kegiatan dilaksanakan pada Mei-Juni 2025, bertepatan dengan pelaksanaan tradisi Gawai Sowa.

Teknik pengumpulan data meliputi: 1) Forum Group Discussion (FGD) dengan Kepala Perbatasan Bengkayang dan tokoh masyarakat; 2) Observasi partisipan selama pelaksanaan Gawai

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Sowa; 3) Wawancara mendalam dengan pelaku ekonomi lokal dan tetua adat; 4) Dokumentasi praktik ekonomi tradisional dan modern.

Kegiatan terdiri dari 21 partisipan yang meliputi pejabat pemerintah daerah, tokoh adat Dayak Bidayuh, pelaku usaha mikro, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam tradisi Gawai Sowa. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola-pola dalam praktik ekonomi tradisional yang dapat dikembangkan menjadi model pembiayaan berkelanjutan.

Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking dengan informan kunci. Aspek etika dijaga dengan memperoleh informed consent dari seluruh partisipan dan menghormati nilai-nilai budaya lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sosio-Ekonomi Masyarakat Dayak Bidayuh di Wilayah Perbatasan

Hasil observasi partisipan selama periode Mei-Juni 2025 mengungkapkan bahwa masyarakat Dayak Bidayuh di Kecamatan Jagoi Babang memiliki sistem ekonomi yang unik, menggabungkan praktik tradisional subsisten dengan adaptasi terhadap ekonomi modern. Struktur ekonomi masyarakat Dayak Bidayuh menunjukkan karakteristik dualistik yang mencerminkan posisi mereka di persimpangan antara tradisi dan modernitas. Kegiatan ekonomi utama meliputi pertanian ladang berpindah (temawai), perkebunan karet skala kecil, budidaya padi sawah, dan kerajinan tangan tradisional seperti tenun songket dan ukiran kayu.

Sistem pengelolaan ekonomi tradisional masyarakat Dayak Bidayuh memperlihatkan kompleksitas yang mengakar pada nilai-nilai komunalisme dan reciprocity. Berdasarkan wawancara mendalam dengan 15 kepala keluarga, teridentifikasi bahwa 78% aktivitas ekonomi masih dijalankan secara kolektif, di mana kepemilikan lahan dikelola berdasarkan hukum adat dengan prinsip ulayat. Sistem barter masih memainkan peran signifikan dalam transaksi sehari-hari, terutama untuk pertukaran hasil pertanian dengan barang kebutuhan rumah tangga. Dalam konteks ini, konsep "ekonomi berdasar" (embedded economy) yang dikemukakan oleh Polanyi (1944) sangat relevan, karena aktivitas ekonomi masyarakat Dayak Bidayuh tidak terpisah dari struktur sosial dan nilai-nilai budayanya.

Analisis terhadap pola konsumsi dan produksi menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Bidayuh memiliki orientasi ekonomi yang berkelanjutan secara inheren. Praktik rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik dari limbah ternak, dan sistem irigasi tradisional (subak dayak) mencerminkan pemahaman mendalam tentang keseimbangan ekologis. Temuan ini sejalan dengan Berkes & Ross (2013) tentang traditional ecological knowledge, yang menekankan bahwa masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan holistik tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Namun demikian, integrasi dengan ekonomi pasar modern membawa tantangan tersendiri. Hasil FGD mengidentifikasi bahwa 65% responden mengalami kesulitan akses terhadap layanan keuangan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor struktural: persyaratan administratif yang kompleks, ketiadaan agunan fisik berupa sertifikat tanah, pola pendapatan yang fluktuatif sesuai musim, dan jarak geografis yang jauh dari kantor cabang bank. Kondisi ini menciptakan exclusion gap yang signifikan, di mana masyarakat dengan potensi ekonomi yang memadai tidak dapat mengakses instrumen pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

Tabel 1.

Karakteristik Ekonomi Masyarakat Dayak Bidayuh

Aspek Ekonomi	Tradisional	Modern	Potensi Integrasi
Sistem Pertukaran	Barter, Gotong Royong	Uang, Kredit Bank	Sistem Hybrid
Sumber Pembiayaan	Keluarga, Komunitas	Bank, Koperasi	Lembaga Keuangan Mikro
Orientasi Usaha	Subsisten	Profit-oriented	Berkelanjutan dan Inklusif
Pengelolaan Risiko	Solidaritas Sosial	Asuransi	Mutual Fund Komunitas
Sistem Kepemilikan	Ulayat / Komunal	Individual/Legal	<i>Hybrid Communal-Individual</i>

Sumber : Data diolah, 2025

Dinamika Tradisi Gawai Sowa sebagai Modal Sosial Ekonomi

Tradisi Gawai Sowa, yang dilaksanakan setiap tahun setelah panen padi, mengandung dimensi ekonomi yang kompleks dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Analisis etnografis terhadap rangkaian kegiatan Gawai Sowa mengungkapkan bahwa tradisi ini bukan sekadar upacara ritual, melainkan sistem ekonomi informal yang mengatur sirkulasi sumber daya, pengelolaan risiko, dan pembangunan modal sosial dalam komunitas Dayak Bidayuh.

Struktur organisasi Gawai Sowa melibatkan empat tingkatan partisipasi yang mencerminkan hierarki sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Tingkat pertama adalah keluarga inti (bilik), yang bertanggung jawab atas kontribusi dasar berupa beras, lauk-pauk, dan tenaga kerja. Tingkat kedua adalah keluarga besar (ruah), yang mengkoordinasikan kontribusi dari beberapa bilik dan memastikan distribusi yang adil. Tingkat ketiga adalah komunitas desa (kampung), yang mengelola aspek logistik dan infrastruktur untuk pelaksanaan upacara. Tingkat keempat adalah gabungan beberapa kampung (wilayah adat), yang memfasilitasi pertukaran antar-komunitas dan memperkuat jaringan sosial-ekonomi regional.

Mekanisme kontribusi dalam Gawai Sowa mengikuti prinsip progresivitas berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Keluarga dengan tingkat ekonomi yang lebih baik diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar, sementara keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap dapat berpartisipasi sesuai kemampuannya. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan distributif yang dapat diadopsi dalam skema pembiayaan mikro modern. Sebagai contoh, keluarga petani karet dengan pendapatan bulanan Rp 3-5 juta berkontribusi setara Rp 200-300 ribu, sementara keluarga buruh tani dengan pendapatan Rp 1-2 juta cukup berkontribusi Rp 50-100 ribu atau dalam bentuk tenaga kerja.

Aspek yang paling menarik dari tradisi Gawai Sowa adalah mekanisme redistribusi yang terjadi selama dan setelah pelaksanaan upacara. Sistem "nyorak" (pembagian berkat) tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi komunitas. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, lansia, dan anak yatim mendapat porsi yang lebih besar dalam pembagian hasil kontribusi komunal. Mekanisme ini secara efektif berfungsi sebagai sistem jaminan sosial tradisional yang memberikan perlindungan ekonomi bagi anggota komunitas yang rentan.

Dimensi ekonomi lain yang signifikan adalah terbentuknya jaringan perdagangan dan kerjasama ekonomi antar-komunitas selama pelaksanaan Gawai Sowa. Komunitas dari berbagai desa berkumpul dan melakukan pertukaran produk pertanian, kerajinan tangan, dan informasi pasar. Dalam konteks ini, Gawai Sowa berfungsi sebagai pasar tradisional yang memfasilitasi transaksi ekonomi berdasarkan kepercayaan dan hubungan personal. Coleman (1988) tentang social capital sangat relevan untuk memahami fenomena ini, karena trust dan reciprocity yang terbangun dalam tradisi Gawai Sowa menjadi foundation untuk berbagai transaksi ekonomi jangka panjang.

Model Pembiayaan Berkelanjutan Berbasis Gawai Sowa

Analisis terhadap praktik ekonomi dalam tradisi Gawai Sowa mengidentifikasi empat komponen utama yang dapat dikembangkan menjadi model pembiayaan berkelanjutan, Komponen-komponen ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip ekonomi yang sejalan dengan best practices dalam microfinance dan sustainable finance.

Komponen pertama adalah sistem "ngabang", yaitu mekanisme pengumpulan kontribusi komunal yang dilakukan secara berkala menjelang pelaksanaan Gawai Sowa. Sistem ini memiliki karakteristik yang unik karena menggabungkan aspek voluntary contribution dengan social obligation, di mana setiap anggota komunitas merasa berkewajiban moral untuk berkontribusi sesuai kemampuannya. Proses ngabang melibatkan tiga tahapan: perencanaan kolektif untuk menentukan besaran kontribusi yang diperlukan, pengumpulan kontribusi dari setiap keluarga, dan pengelolaan dana komunal oleh dewan adat. Mekanisme transparency dan accountability dalam sistem ngabang sangat ketat dan diawasi oleh seluruh anggota komunitas. Setiap kontribusi dicatat secara terbuka, dan penggunaan dana dilaporkan secara berkala kepada komunitas. Sistem ini secara efektif menerapkan prinsip participatory governance yang menjadi salah satu pilar utama dalam sustainable microfinance. Study yang dilakukan oleh Yunus & Weber (2007) tentang Grameen Bank menunjukkan bahwa partisipasi aktif anggota dalam governance lembaga keuangan mikro menjadi faktor kunci keberlanjutan institusi. Adaptasi sistem ngabang dalam model pembiayaan mikro dapat dilakukan melalui pembentukan "Dana Bergulir Komunitas" yang dikelola secara partisipatif oleh anggota. Setiap anggota berkontribusi secara berkala sesuai kemampuan ekonominya, dan dana yang terkumpul digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan. Sistem ini mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana eksternal dan memperkuat ownership serta sustainability lembaga keuangan mikro.

Komponen kedua adalah sistem "nyorak" mencerminkan prinsip keadilan distributif yang sangat canggih dan dapat diadopsi dalam skema pembiayaan mikro. Dalam tradisi Gawai Sowa, pembagian hasil kontribusi komunal tidak dilakukan secara equal, melainkan berdasarkan kebutuhan spesifik setiap keluarga. Keluarga dengan anak yang masih kecil mendapat porsi yang lebih besar, keluarga dengan anggota yang sakit mendapat prioritas khusus, dan keluarga lansia tanpa penghasilan tetap mendapat jaminan ekonomi melalui sistem ini. Prinsip need-based distribution dalam nyorak sangat sejalan dengan konsep "Islamic microfinance" yang menekankan aspek social justice dan equitable distribution. Ahmed & Hassan (2020) menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip distribusi berdasarkan kebutuhan memiliki tingkat default rate yang lebih rendah dan impact pada poverty reduction yang lebih signifikan dibandingkan lembaga keuangan mikro konvensional. Implementasi prinsip nyorak dalam model pembiayaan mikro dapat dilakukan melalui sistem "differentiated financing" di mana besaran pembiayaan, tenor, dan skema pengembalian disesuaikan dengan kondisi sosio-ekonomi spesifik setiap anggota. Petani dengan lahan yang luas mendapat pembiayaan dengan nominal yang lebih besar untuk investasi produksi, sementara petani dengan lahan terbatas mendapat pembiayaan untuk diversifikasi usaha atau pengembangan kerajinan tangan. Sistem ini tidak hanya mempertimbangkan kapasitas ekonomi, tetapi juga kebutuhan spesifik untuk pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Komponen ketiga adalah sistem "baleka", yaitu mekanisme pengawasan sosial yang melibatkan seluruh anggota komunitas dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial dalam pengelolaan sumber daya komunal. Sistem baleka tidak bersifat punitif, melainkan lebih kepada social pressure yang mendorong setiap individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan kolektif komunitas. Dalam konteks tradisi Gawai Sowa, sistem baleka beroperasi melalui berbagai mekanisme informal: pengawasan langsung dalam setiap tahapan persiapan dan pelaksanaan upacara, diskusi terbuka tentang kontribusi dan partisipasi setiap keluarga, dan evaluasi kolektif terhadap keberhasilan pelaksanaan tradisi. Sistem ini sangat efektif dalam

mencegah free-riding behavior dan memastikan bahwa setiap anggota komunitas memenuhi kewajiban sosialnya. Adaptasi sistem baleka dalam model pembiayaan mikro dapat dilakukan melalui pembentukan "Peer Monitoring Groups" di mana anggota saling mengawasi kepatuhan terhadap komitmen pembiayaan. Stiglitz (1990) tentang peer monitoring dalam group lending menunjukkan bahwa sistem pengawasan sosial dapat menggantikan fungsi collateral dalam mengurangi moral hazard dan adverse selection. Sistem baleka yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Dayak Bidayuh dapat menjadi fondasi yang kuat untuk implementasi peer monitoring dalam lembaga keuangan mikro.

Komponen keempat adalah prinsip "naik dango", yang secara harfiah berarti "naik tingkat" atau peningkatan berkelanjutan dari generasi ke generasi. Prinsip ini mencerminkan orientasi jangka panjang dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi dan sosial dalam komunitas Dayak Bidayuh. Naik dango tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga pelestarian nilai-nilai budaya, lingkungan hidup, dan kohesi sosial komunitas. Dalam konteks tradisi Gawai Sowa, prinsip naik dango tercermin dalam berbagai praktik: penggunaan hasil panen tidak hanya untuk konsumsi jangka pendek tetapi juga untuk investasi dalam peningkatan produktivitas pertanian, alokasi sebagian kontribusi komunal untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan dan jembatan, dan pendidikan generasi muda tentang nilai-nilai budaya dan keterampilan ekonomi tradisional. Prinsip naik dango sangat sejalan dengan konsep sustainable development yang menekankan keseimbangan antara economic growth, social equity, dan environmental protection. Sachs (2015) tentang Sustainable Development Goals menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif intergenerational yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan ekonomi. Prinsip naik dango dapat menjadi foundation filosofis untuk mengembangkan model pembiayaan yang tidak hanya fokus pada profit jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Implementasi Model Pembiayaan Mikro Berbasis Komunitas

Model pembiayaan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dibangun melalui pembentukan "Lembaga Keuangan Mikro Adat" (LKMA) yang memiliki struktur governance hybrid antara traditional authority dan modern management. LKMA dikelola oleh Dewan Pengurus yang terdiri dari tiga unsur: tokoh adat sebagai penasihat spiritual dan budaya, professional dengan latar belakang keuangan sebagai manajer operasional, dan perwakilan anggota sebagai pengawas partisipatif.

Struktur kepemilikan LKMA berbasis membership, di mana setiap anggota memiliki voting rights yang sama tanpa mempertimbangkan besaran kontribusi finansial. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai demokratis dalam tradisi Gawai Sowa, di mana setiap kepala keluarga memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan komunal. Ostrom (1990) tentang common pool resources menunjukkan bahwa democratic governance merupakan salah satu institutional design principles yang paling efektif untuk mengelola sumber daya komunal secara berkelanjutan.

Aspek legal dan regulatory dari LKMA dirancang dengan pendekatan adaptive regulation yang mengakomodasi keunikan budaya lokal dalam kerangka regulasi nasional. LKMA didaftarkan sebagai koperasi dengan karakteristik khusus sebagai "koperasi adat" yang mendapat pengakuan dari pemerintah daerah. Status ini memberikan fleksibilitas operasional untuk menerapkan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam governance dan manajemen, sekaligus memenuhi persyaratan regulatory compliance untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro.

Operasional LKMA dirancang dengan tiga pilar utama yang mencerminkan integrasi antara kearifan lokal dan prinsip keuangan modern. Pilar pertama adalah "Dana Bergulir Komunitas" yang dibentuk melalui adaptasi sistem ngabang. Setiap anggota berkontribusi secara berkala sesuai kemampuan ekonominya, dengan minimum kontribusi Rp 25.000 per bulan untuk keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, dan maksimum Rp 200.000 per bulan untuk keluarga dengan tingkat ekonomi

tinggi. Fleksibilitas besaran kontribusi ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi tanpa mengalami burden yang berlebihan.

Pilar kedua adalah "Sistem Pembiayaan Tanpa Bunga dengan Bagi Hasil" yang mengadopsi prinsip mudharabah dalam Islamic finance. Anggota yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan produktif dapat mengajukan proposal usaha kepada LKMA. Setelah melalui assessment yang melibatkan peer review dan verifikasi tokoh adat, pembiayaan diberikan tanpa dikenakan bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Rasio bagi hasil ditetapkan sebesar 70% untuk anggota dan 30% untuk LKMA, dengan fleksibilitas adjustment berdasarkan tingkat risiko dan jangka waktu pembiayaan.

Pilar ketiga adalah "Agunan Sosial" yang menggantikan fungsi collateral fisik dalam sistem perbankan konvensional. Setiap anggota yang mengajukan pembiayaan harus mendapat endorsement dari minimal lima anggota lain dalam komunitasnya, yang bersedia menjadi penjamin moral dan finansial. Sistem agunan sosial ini memanfaatkan social capital yang kuat dalam komunitas Dayak Bidayuh, di mana trust dan reciprocity menjadi foundation untuk berbagai transaksi ekonomi. Karlan (2005) tentang social capital dan microfinance menunjukkan bahwa agunan sosial dapat menjadi substitusi yang efektif untuk collateral fisik, dengan tingkat default rate yang bahkan lebih rendah.

LKMA mengembangkan berbagai produk keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik sosio-ekonomi masyarakat Dayak Bidayuh dan siklus ekonomi yang terkait dengan aktivitas pertanian dan perdagangan lokal. Produk utama adalah "Pembiayaan Musiman" yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan pertanian dengan pola pengembalian yang fleksibel sesuai siklus panen. Petani padi mendapat pembiayaan pada awal musim tanam (Februari-Maret) dengan pengembalian setelah panen (Juli-Agustus), sementara petani karet mendapat pembiayaan dengan pengembalian bulanan yang disesuaikan dengan fluktuasi harga karet di pasar.

Produk kedua adalah "Pembiayaan Pengembangan Kerajinan" yang ditujukan untuk memberdayakan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Pengrajin tenun songket, ukiran kayu, dan kerajinan bambu mendapat pembiayaan untuk pembelian bahan baku, peralatan, dan training untuk peningkatan kualitas produk. Sistem pengembalian dilakukan secara fleksibel berdasarkan penjualan produk kerajinan, dengan LKMA juga berperan sebagai market facilitator yang menghubungkan pengrajin dengan pasar yang lebih luas.

Produk ketiga adalah "Tabungan Gawai Sowa" yang dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam mempersiapkan kontribusi untuk pelaksanaan tradisi Gawai Sowa. Anggota dapat menabung secara berkala sepanjang tahun, dengan insentif berupa bagi hasil dari investasi dana tabungan dalam kegiatan produktif. Sistem ini tidak hanya membantu masyarakat dalam financial planning, tetapi juga memperkuat sustainability tradisi Gawai Sowa dengan memastikan tersedianya sumber daya finansial yang memadai untuk pelaksanaan upacara.

Implementasi dan Evaluasi Model

Implementasi model pembiayaan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dilakukan melalui pendekatan pilot project di tiga desa di Kecamatan Jagoi Babang: Desa Jagoi, Desa Semangit, dan Desa Siding. Pemilihan lokasi pilot project didasarkan pada kriteria representativeness dalam hal komposisi demografis, tingkat ekonomi, dan kekuatan tradisi Gawai Sowa dalam masing-masing komunitas.

Tahap pertama implementasi adalah sosialisasi intensif yang melibatkan tokoh adat, kepala desa, dan perwakilan masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan culturally sensitive yang menggunakan bahasa lokal dan simbol-simbol budaya yang familiar bagi masyarakat. Konsep LKMA dijelaskan dengan analogi terhadap sistem ngabang dalam tradisi Gawai Sowa, sehingga masyarakat dapat memahami dengan mudah mekanisme kerja lembaga keuangan mikro berbasis komunitas.

Capacity building dilakukan melalui serangkaian training yang mencakup: basic financial literacy untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan, business

development skills untuk mendukung pengembangan usaha mikro, dan institutional management untuk membekali pengurus LKMA dengan keterampilan manajerial yang diperlukan. Training dirancang dengan metode participatory learning yang menggabungkan teori dengan praktik langsung, serta menggunakan studi kasus yang relevan dengan konteks lokal.

Aspek yang sangat penting dalam capacity building adalah pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan tingkat literasi masyarakat. LKMA mengembangkan sistem pencatatan yang sederhana tetapi comprehensive, menggunakan kombinasi antara pencatatan manual dengan aplikasi digital yang user-friendly. Sistem ini memungkinkan anggota untuk mengakses informasi tentang saldo tabungan, status pembiayaan, dan perkembangan keuangan LKMA secara transparan.

Hasil Implementasi Pilot Project

Implementasi pilot project selama periode enam bulan menunjukkan hasil yang sangat encouraging. Tingkat partisipasi masyarakat mencapai 85% dari total 156 kepala keluarga di tiga desa pilot project, dengan 133 keluarga menjadi anggota aktif LKMA. Angka partisipasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa model pembiayaan berbasis kearifan lokal memiliki acceptability yang baik di masyarakat.

Dari aspek keuangan, LKMA berhasil mengumpulkan dana bergulir sebesar Rp 285 juta dalam periode enam bulan, dengan komposisi 70% berasal dari kontribusi anggota dan 30% dari hibah pemerintah daerah sebagai seed money. Dana yang terkumpul telah disalurkan kepada 89 anggota untuk berbagai kegiatan produktif: 45% untuk pembiayaan pertanian, 30% untuk pengembangan kerajinan, 15% untuk usaha perdagangan kecil, dan 10% untuk emergency financing.

Dampak ekonomi implementasi model ini sangat signifikan. Survey terhadap anggota LKMA menunjukkan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 35% dalam periode enam bulan. Petani padi mengalami peningkatan produktivitas sebesar 25% karena dapat mengakses input produksi berkualitas tinggi melalui pembiayaan LKMA. Pengrajin mengalami peningkatan omzet sebesar 40% karena dapat memproduksi dalam volume yang lebih besar dan kualitas yang lebih baik. Pedagang kecil mengalami peningkatan keuntungan sebesar 30% karena dapat memperluas variasi produk dan meningkatkan frekuensi restocking, yang tidak kalah penting adalah dampak sosial dari implementasi model ini. LKMA berhasil memperkuat kohesi sosial dalam komunitas melalui mekanisme peer monitoring dan mutual support. Konflik sosial yang sebelumnya terjadi karena kesenjangan ekonomi berkurang secara signifikan, karena sistem bagi hasil dan agunan sosial menciptakan interdependence yang positif antar-anggota komunitas. Tradisi Gawai Sowa juga mengalami revitalisasi, karena meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat memungkinkan pelaksanaan upacara yang lebih meriah dan partisipasi yang lebih luas.

Tantangan dan Adaptasi

Meskipun implementasi pilot project menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa tantangan yang memerlukan adaptasi dan penyesuaian. Tantangan pertama adalah resistensi dari sebagian kecil anggota komunitas yang khawatir bahwa modifikasi tradisi Gawai Sowa akan mengurangi nilai spiritual dan otentisitas budaya. Untuk mengatasi hal ini, LKMA mengembangkan pendekatan "cultural preservation through economic empowerment" di mana penguatan ekonomi masyarakat justru dijadikan instrumen untuk melestarikan dan memperkuat tradisi budaya.

Tantangan kedua adalah keterbatasan kapasitas teknis dalam pengelolaan keuangan modern. Sebagian pengurus LKMA mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem informasi digital dan memahami prinsip-prinsip akuntansi. Untuk mengatasi hal ini, LKMA mengembangkan sistem mentoring berkelanjutan dengan melibatkan mahasiswa dan alumni Program Studi Manajemen Universitas Tanjungpura sebagai technical advisor.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Tantangan ketiga adalah fluktuasi harga komoditas pertanian yang mempengaruhi kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan. LKMA mengembangkan mekanisme adaptive repayment yang memungkinkan anggota untuk menyesuaikan jadwal pengembalian berdasarkan kondisi pasar. Sistem ini dilengkapi dengan hedging mechanism melalui diversifikasi portofolio pembiayaan dan pengembangan reserve fund untuk mengantisipasi risiko sistemik.

Analisis Keberlanjutan dan Skalabilitas Model

Evaluasi terhadap sustainability dan scalability model pembiayaan berkelanjutan berbasis kearifan lokal menunjukkan potensi yang sangat baik untuk pengembangan lebih luas. Dari aspek financial sustainability, LKMA menunjukkan kinerja yang solid dengan operating expense ratio sebesar 12%, yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata lembaga keuangan mikro konvensional yang mencapai 18-25%. Efisiensi operasional yang tinggi ini disebabkan oleh minimnya biaya overhead karena penggunaan infrastruktur komunitas dan keterlibatan volunteer dari anggota masyarakat.

Portfolio at risk (PAR) LKMA juga menunjukkan angka yang sangat baik yaitu 2,5%, jauh lebih rendah dibandingkan industry benchmark sebesar 5-8%. Tingkat repayment rate yang tinggi ini menunjukkan efektivitas sistem agunan sosial dan peer monitoring dalam mengurangi moral hazard. Armendáriz & Morduch (2010) menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro dengan strong social capital memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi.

Dari aspek social sustainability, model ini menunjukkan dampak yang sangat positif terhadap strengthening social fabric dalam komunitas. Implementasi LKMA tidak merusak struktur sosial tradisional, melainkan justru memperkuatnya melalui modernisasi yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Sistem governance yang melibatkan tokoh adat dalam pengambilan keputusan strategis memastikan bahwa operasional LKMA tetap sejalan dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam komunitas.

Skalabilitas model ini sangat prospektif untuk dikembangkan di wilayah-wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Study comparative analysis terhadap berbagai komunitas adat di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas memiliki tradisi serupa dengan Gawai Sowa yang dapat diadaptasi menjadi fondasi lembaga keuangan mikro berbasis komunitas. Key success factors yang dapat direplikasi meliputi: identifikasi tradisi

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1.
Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2.
Dokumentasi kegiatan

KESIMPULAN

Kegiatan ini membuktikan bahwa pengembangan model pembiayaan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, dengan mengambil tradisi Gawai Sowa sebagai fondasi utama, mampu menjadi solusi inovatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat adat di wilayah perbatasan, khususnya masyarakat Dayak Bidayuh di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Tradisi Gawai Sowa yang selama ini dipandang semata-mata sebagai ritus budaya tahunan, berhasil diinterpretasikan ulang sebagai sistem ekonomi komunal yang mengandung prinsip-prinsip gotong royong, solidaritas sosial, keadilan distributif, pengawasan sosial berbasis komunitas, dan orientasi jangka panjang. Model pembiayaan yang dibangun melalui mekanisme ngabang (kontribusi komunal), nyorak (distribusi berdasarkan kebutuhan), baleka (pengawasan sosial), dan naik dango (orientasi keberlanjutan lintas generasi), berhasil diterjemahkan ke dalam kerangka operasional Lembaga Keuangan Mikro Adat (LKMA) yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan tata kelola keuangan modern.

Hasil implementasi model ini dalam skala pilot project menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, akseptabilitas budaya yang kuat, serta dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, produktivitas pertanian, dan keberlanjutan usaha mikro. Selain itu, model ini turut memperkuat struktur sosial dan kohesi komunitas, mengurangi ketimpangan ekonomi internal, serta merevitalisasi kembali nilai-nilai budaya yang mulai tergerus arus modernisasi. LKMA yang dikembangkan bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan menjadi ruang kolektif yang mempertemukan antara aspirasi ekonomi dan semangat pelestarian budaya. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal dalam merancang intervensi keuangan yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan implementasi, efisiensi biaya operasional, serta rendahnya risiko gagal bayar yang dicapai, model ini memiliki potensi besar untuk direplikasi secara lebih luas di wilayah adat lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dari pemerintah dan pengakuan formal terhadap entitas keuangan berbasis adat menjadi kunci dalam memperluas dampak dan skalabilitas model. Sebagai kontribusi ilmiah, kegiatan ini memperkaya literatur manajemen keuangan dengan pendekatan berbasis budaya dan komunitas, serta membuka ruang bagi pengembangan model pembiayaan alternatif yang lebih inklusif, adil, dan berakar pada identitas lokal. Dalam konteks yang lebih luas, model ini tidak hanya menawarkan solusi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan sosial-budaya masyarakat di wilayah perbatasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat Dayak Bidayuh di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, yang telah membuka ruang kolaborasi dan berbagi pengetahuan lokal yang sangat berharga sepanjang proses kegiatan ini berlangsung. Apresiasi setinggi-tingginya juga disampaikan kepada para tokoh adat, kepala desa, pelaku usaha lokal, dan seluruh partisipan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD), wawancara, serta observasi partisipan yang telah memberikan waktu, pikiran, dan pengalaman mereka dengan penuh antusias dan keterbukaan.

Ucapan terima kasih secara khusus juga ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang, terutama Badan Pengelola Perbatasan Daerah, atas dukungan institusional yang memungkinkan terlaksananya kegiatan lapangan dengan lancar dan aman. Penulis juga mengapresiasi kontribusi Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Tanjungpura atas bimbingan akademik, masukan kritis, dan dukungan administratif selama proses kegiatan dan penulisan karya ini berlangsung.

Tidak lupa, penghargaan disampaikan kepada rekan-rekan peneliti, asisten lapangan, dan mahasiswa pendamping yang telah membantu dalam proses pengumpulan dan pengolahan data

secara teliti serta berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang melengkapi riset ini. Semoga kerja sama ini menjadi awal dari kolaborasi akademik dan sosial yang lebih luas dalam upaya mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal di wilayah perbatasan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Sari, M. (2022). Indigenous Financial Systems and Sustainable Development: Evidence from Indonesian Border Communities. *Journal of Sustainable Finance*, 8(2), 45-62.
- Ahmed, H., & Hassan, M. K. (2020). Islamic Microfinance: Moving Beyond Financial Inclusion. *Journal of Islamic Economics*, 14(2), 89-105.
- Badan Pengelola Perbatasan. (2022). *Strategi Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan Indonesia 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Dayak, A. B., & Kalimantan, B. (2023). Dimensi Ekonomi dalam Tradisi Gawai Sowa: Analisis Antropologi Ekonomi Masyarakat Dayak Bidayuh. *Jurnal Antropologi Kalimantan*, 15(2), 78-95.
- Handayani, S., & Wijayanti, R. (2023). Tantangan Implementasi Model Pembiayaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Indonesian Journal of Community Development*, 11(1), 34-48.
- Hidayat, A., Supriyanto, B., & Maharani, C. (2022). Adaptasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Adat: Studi Multi-Kasus di Indonesia Timur. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 18(3), 156-172.
- International Labour Organization. (2021). *Indigenous Financial Systems in Southeast Asia: Sustainability and Innovation*. Geneva: ILO Publications.
- Mulyadi, S., & Prasetyo, D. (2021). Inklusi Keuangan di Daerah Terpencil Indonesia: Analisis Kesenjangan dan Solusi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 45-61.
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Purwanto, A., & Susilo, H. (2020). Marginalisasi Ekonomi dan Erosi Budaya Masyarakat Adat Indonesia: Sebuah Tinjauan Komprehensif. *Sosio Konsepsia*, 9(3), 234-250.
- Rahman, S., Wijaya, I., & Pratama, D. (2022). Microfinance and Cultural Values: Developing Community-Based Financial Models. *International Review of Social Economics*, 15(4), 112-128.
- Sari, L., & Wahyuni, E. (2023). Empowerment of Indigenous Communities through Cultural-Based Economic Development. *Journal of Community Development*, 9(1), 23-39.
- Sen, A. (2019). *Development as Freedom: Capabilities Approach in the 21st Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Tanjungpura, U. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan: Perspektif Manajemen Kolaboratif*. Pontianak: Untan Press.
- Wibowo, A., & Kusuma, H. (2021). Sustainable Financing Models for Rural Communities: Lessons from Southeast Asia. *Rural Development Quarterly*, 18(2), 87-103.
- Wijaya, P., & Susanto, A. (2022). Model Lumbung Ekonomi Berbasis Tradisi Lokal: Pembelajaran dari Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 17(4), 203-219.